



**Judul** : DPR Janji Libatkan Masyarakat Bahas RUU ITE  
**Tanggal** : Rabu, 29 Maret 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## LEGISLASI

# DPR Janji Libatkan Masyarakat Bahas RUU ITE

**JAKARTA, KOMPAS** — Setelah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2023, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai menemui titik terang. DPR akan memulai pembahasan pada April dan berkomitmen menghimpun sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. Pembahasan juga tak akan dilakukan secara berlarut-larut dan ditargetkan rampung dalam dua masa persidangan.

Pada Selasa (28/3/2023), Komisi I DPR yang mendapat tugas membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) telah membentuk panitia kerja (panja). "Panja sudah dibentuk. Saya yang menjadi ketuanya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Kharis Almsyahari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sebelum membahas bersama pemerintah, Komisi I fokus menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi, di antaranya, dihimpun dari kalangan masyarakat sipil. Pada Senin (27/3), Komisi I secara khusus mengundang masyarakat sipil yang tergabung da-

lam Koalisi Serious Revisi UU ITE untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU). Dalam rapat itu, koalisi yang terdiri dari Amnesty International Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (Safenet), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia diminta memberikan pandangan terkait ketentuan yang semestinya diatur atau dihilangkan dalam UU ITE. Tidak hanya itu, Komisi I juga mengundang dan meminta masukan perbaikan UU ITE dari Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech).

Kharis mengatakan masih terbuka kesempatan bagi seluruh pihak menyampaikan usulan terkait RUU ITE. Komisi I masih akan menyelenggarakan satu kali RDPU dengan mengundang pihak-pihak yang bisa memberi masukan terkait revisi UU ITE sebelum memulai pembahasan pasal per pasal. Komisi I juga tak menutup kemungkinan menambahkan jumlah RDPU asalkan pihak yang akan diundang benar-benar menguasai permasalahan dan memiliki usulan konkret terkait RUU ITE.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menambahkan, fraksinya berkomitmen melibatkan publik dalam pembahasan RUU ITE.

Oleh karena itu, selain melalui RDPU di Komisi I, Fraksi Partai Demokrat juga aktif mengadakan audiensi, baik dengan organisasi masyarakat sipil, asosiasi, maupun perkumpulan korban kriminalisasi UU ITE.

Berdasarkan masukan yang terhimpun, kata Rizki, masyarakat tidak hanya menginginkan pembahasan terbatas pada tujuh poin revisi yang diusulkan pemerintah. Selain berfokus pada persoalan HAM serta kebebasan berpendapat dan berekspresi, publik juga menyoroti sinkronisasi pemidanaan yang ada di RUU ITE dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada akhir Desember 2022. Tidak hanya itu, sejumlah usul terkait transaksi elektronik juga disampaikan masyarakat kepada Fraksi Partai Demokrat.

### Koridor revisi

Menurut Rizki, Komisi I akan berfokus pada pembahasan seputar ranah informasi untuk menjamin hak digital warga. Usul perubahan di luar itu, misalnya yang terkait dengan transaksi elektronik, bisa memperluas cakupan revisi. Konsekuensi dari perluasan itu, pembahasan akan membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Oleh karena itu, panja Komisi I DPR dan pemerintah perlu

menyepakati koridor revisi. "DPR dan pemerintah nanti harus bisa memutuskan apakah dalam revisi UU ITE ini kita akan berpatokan pada surpres (surat presiden) yang dikirim ke DPR atau ada usulan baru lain yang bisa dibahas bersama," tuturnya.

Pembahasan bersama pemerintah dijadwalkan dimulai pada pekan terakhir Masa Persidangan IV 2022-2023 atau pada pertengahan April ini. Tak ingin berlarut-larut, Komisi I DPR menargetkan pembahasan RUU ITE rampung dalam dua masa persidangan. "Saya menargetkan, (pada) masa sidang setelah Lebaran (Masa Persidangan V) selesai (pembahasan RUU ITE)," kata Kharis.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pemerintah dan DPR harus membuktikan keseriusan dengan segera membahas dan mengesahkan RUU ITE. Selain itu, penting pula memperhatikan usul masyarakat yang menginginkan agar revisi UU ITE dilakukan secara menyeluruh. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir, pembentuk UU telah mengeciwakan masyarakat lantaran mengabaikan partisipasi publik dalam penyusunan sejumlah UU, seperti UU Cipta Kerja, UU KPK, dan KUHP. (NIA)